

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam suatu masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin.¹ Jumlah penduduk miskin di Indonesia relatif masih sangat besar. Berdasarkan data dari (SUSENAS) yang dikeluarkan pada Bulan Maret 2012 menggambarkan bahwa penduduk miskin di Indonesia jumlahnya sangat besar. Tercatat pada tahun 2007 berjumlah 37,168.3 juta penduduk miskin dan pada tahun 2008 turun menjadi 34,963.3 juta. Namun pada tahun 2009 hingga 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan yakni berjumlah 29,132.40 juta. Hasil tersebut tercapai karena adanya peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia².

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2007-2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jutaan)
2007	37.168.3
2008	34.963.3
2009	32.530.0
2010	31.023.40
2011	30.018.93
2012	28.594.60

Sumber : SUSENAS 2012

Dengan permasalahan yang luas dan kompleks, kemiskinan perlu ditangani secara terpadu, terencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu,

¹Parsudi Suparlan, *Kemiskinan Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,1993), xi.

² Vendi Wijanarko, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember* (Jember: Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2013), Skripsi, 2.

sesuai dengan Perpres 15/2010, pemerintah mengembangkan tiga kelompok program kemiskinan, yang kemudian pada tahun 2011 ditambahkan Klaster 4 Program Pro Rakyat sesuai direktif Presiden, sebagai berikut:

Gambar 1

Kluster Program-program Penanggulangan Kemiskinan³



Ditinjau dari sisi metodologi, kegagalan program pengentasan kemiskinan menurut Dawam Raharjo⁴ adalah karena kesalahan dalam mendefinisikan konsep kemiskinan, sehingga implikasi metodologis dalam mengukur kemiskinan menjadi bias. Para peneliti mencoba mencari variabel tunggal yang bersifat krusial dalam memaknai kemiskinan, yaitu terbatas pada variabel ekonomi, yang secara global kemiskinan sering diukur dari pendapatan atau pengeluaran yang diperoleh dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Seseorang dikatakan miskin apabila secara ekonomi tidak mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan papan yang diukur menurut batas ‘garis kemiskinan’ tertentu. Padahal dimensi kemiskinan adalah majemuk dengan variabel yang kompleks.

³ Tim Pokja Pengendali PNPM Mandiri, PNPM Mandiri Info Kit 2012, (Jakarta: Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri, 2012), 2.

⁴ Dawam Raharjo, *Kemiskinan: Menggali pengalaman pembangunan. Dalam menuju Indonesia Sejahtera* (Jakarta : Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), xvi.

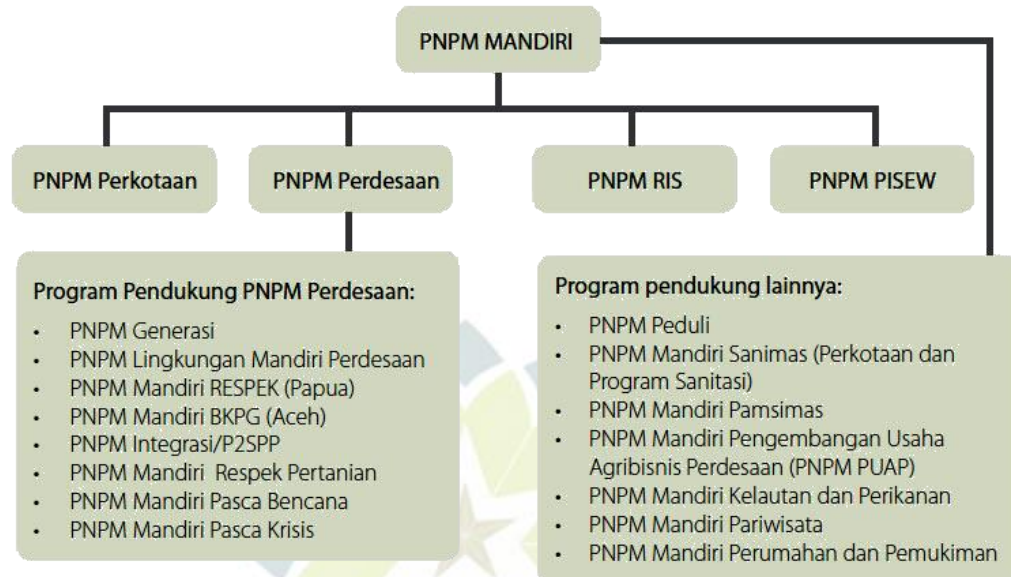
Ancok⁵ dalam Suparlan, mengatakan ketidak efektifan program pengentasan kemiskinan ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama adalah adalah penduduk miskin tidak responsif dengan perubahan sebelum dia yakin benar apakah perubahan tersebut meningkatkan pendapatan keluarganya. Hal ini wajar dilakukan karena penduduk miskin menggunakan seluruh modal dan tenaga yang dimiliki untuk melaksanakan program sehingga kegagalan program berarti kelaparan. Maka penduduk tersebut mengutamakan keamanan pangan sebelum modal dan tenaga yang dimiliki dicurahkan ke dalam program yang baru tersebut. Kedua adalah bias birokrat. Oleh karena program harus berhasil maka birokrat cenderung memilih penduduk diluar kelompok sasaran yang lebih responsif terhadap perubahan. Selain hal tersebut, setelah program selesai, birokrat tidak mempunyai insentif yang cukup untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan dalam program. Tanpa dukungan tersebut, kegiatan – kegiatan sesuai program tidak menarik lagi dilakukan oleh kelompok sasaran program. Ketiga adalah pemilihan program itu sendiri. Ketidakterlibatan kelompok sasaran program dalam pemilihan program menjadikan program tersebut tidak menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang dihadapi.

PNPM Mandiri adalah kebijakan nasional mengenai pemberdayaan masyarakat untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menciptakan asset bagi kelompok masyarakat miskin. PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Keberhasilan PPK dan P2KP menjadi model pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di perdesaan dan perkotaan di lokasi PNPM Mandiri. PNPM Mandiri dimaksudkan untuk menjadi payung program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (*Community Drive Development*).⁶

⁵ Bagong Suyanto, *Perangkap Kemiskinan Problem dan Strategi Pengentasannya* (Surabaya : Airlangga University Press, 1995), 230.

⁶ Tim Penyusun Peta Jalan Pnpm Mandiri, *Peta Jalan PNPM Mandiri Menuju Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Sekretariat Pokja Pengendali PNPM Mandiri, 2012), 5

Gambar 2
Kategori Program dalam PNPM Mandiri⁷



Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 di Palu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PNPM Mandiri telah menjangkau lebih dari 6.000 kecamatan dan 70.000 desa di 33 propinsi. Kontribusi Bank Dunia dalam bentuk pinjaman luar negeri khusus PNPM Mandiri Pedesaan sampai tahun 2011 mencapai USD 2,830.1 juta atau Rp 25,5 triliun (kurs 1 USD = Rp 9.000). Jumlah tersebut belum ditambah PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Meskipun angka tersebut relatif kecil dibanding APBNP 2012 yang mencapai Rp 1.343 triliun, namun cakupan program yang hampir semua desa dan kota menjadikan PNPM sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan terbesar.

⁷ Tim Pokja Pengendali PNPM Mandiri, *PNPM Mandiri Info Kit* 2012, 4.

Tabel 2
Pembiayaan untuk KDP⁸ dan PNPM Mandiri Perdesaan

Program	Years	IBRD/IDA (US\$ Million)	GOI Contribution (US\$ Million)
KDP1	1998 – 2002	225.0	50.0
KDP Supplemental		48.5	6.5
KDP2	2002 – 2006	320.2	101.3
KDP3a	2003 – 2009	91.0	5.0
KDP3b	2005 – 2009	160.0	81,3
KDP 3b AF	2007 – 2009	121.0	7.0
PNPM Rural	2008 – 2011	231.2	334.6
PNPM Rural AF	2009 – 2011	200.0	832.9
2009 Total/a		1,496.9	1,418.6
PNPM Rural III	2010-2012	785,0	552.0
PNPM Rural IV	2011-2013	532.2	766,37
Total		2,830.1	2,736.97

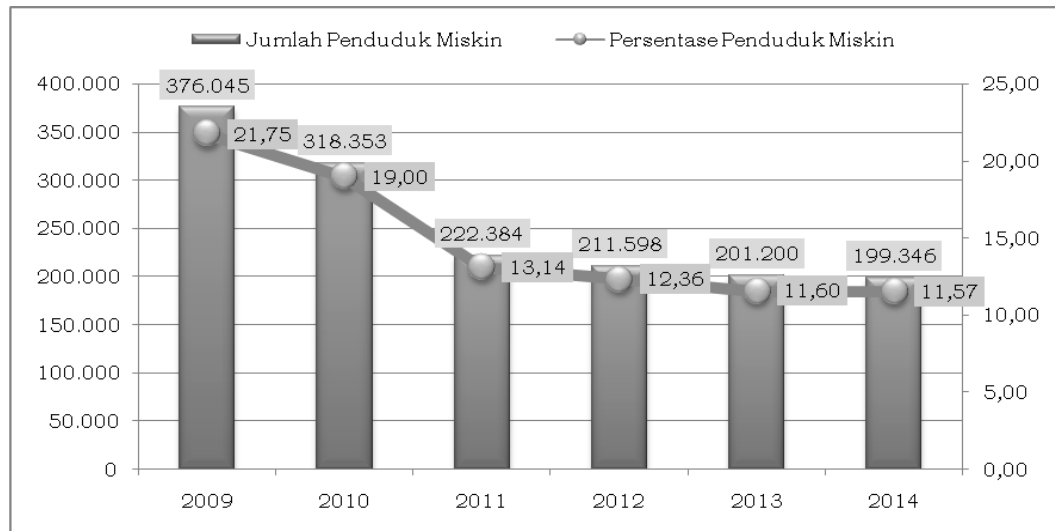
Sumber : Project Appraisal Document Bank Dunia, Juni 2011

Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya tergolong rendah karena dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2011-2013 rata-rata sebesar 4,32%, sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,18% dan Provinsi Jawa Barat sebesar 6,28%. Kabupaten Tasikmalaya termasuk kelompok pertama yaitu wilayah yang memiliki LPE (termasuk migas) kurang dari atau sama dengan lima persen bersama Kabupaten Sukabumi, Garut, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang dan Subang. Dari sebagian besar wilayah-wilayah tersebut, terdapat kesamaan potensi sektoralnya yaitu sektor pertanian. Kecenderungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya hingga tahun 2020 diperkirakan masih berada dikisaran 5%.⁹

⁸ KDP adalah Program Pengembangan Kecamatan, suatu program yang dijalankan sebelum PNPM Mandiri.

⁹ Bappeda Tasikmalaya, "Ringkasan Ranwal Naskah Publikasi Media." <https://www.bappeda.tasikmalayakab.go.id/wp-content/uploads/2015/07/> (diakses 3 Maret 2016)

Grafik 1.
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Tasikmalaya¹⁰



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya pada September 2014 sejumlah 199.346 jiwa telah berkurang dibanding September 2013 sejumlah 201.200 jiwa. Pada September 2013, jumlah ini menduduki peringkat 17 terkecil dibanding 26 Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Pemingkatan berdasarkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, Kabupaten Tasikmalaya menduduki peringkat 10 di Jawa Barat dengan nilai 11.57% atau turun dibanding September 2012 sebesar 11.60%.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Tasikmalaya ada sejak tahun 2007, namun PNPM masih belum massif. PNPM di Kabupaten Tasikmalaya pada saat itu hanya ada di 12 Kecamatan. Pada tahun 2009 PNPM hadir di 35 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, dan menyisakan satu kecamatan *phase out* yaitu Kecamatan Singaparna. Kehadiran PNPM di Kabupaten Tasikmalaya cukup memberikan andil yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan ini terlihat dari cukup besarnya dana yang disalurkan dari pemerintah pusat dan daerah untuk program ini. Bahkan tidak hanya untuk PNPM

¹⁰ Bappeda Tasikmalaya, "Ringkasan Ranwal Naskah Publikasi Media." (diakses 3 Maret 2016)

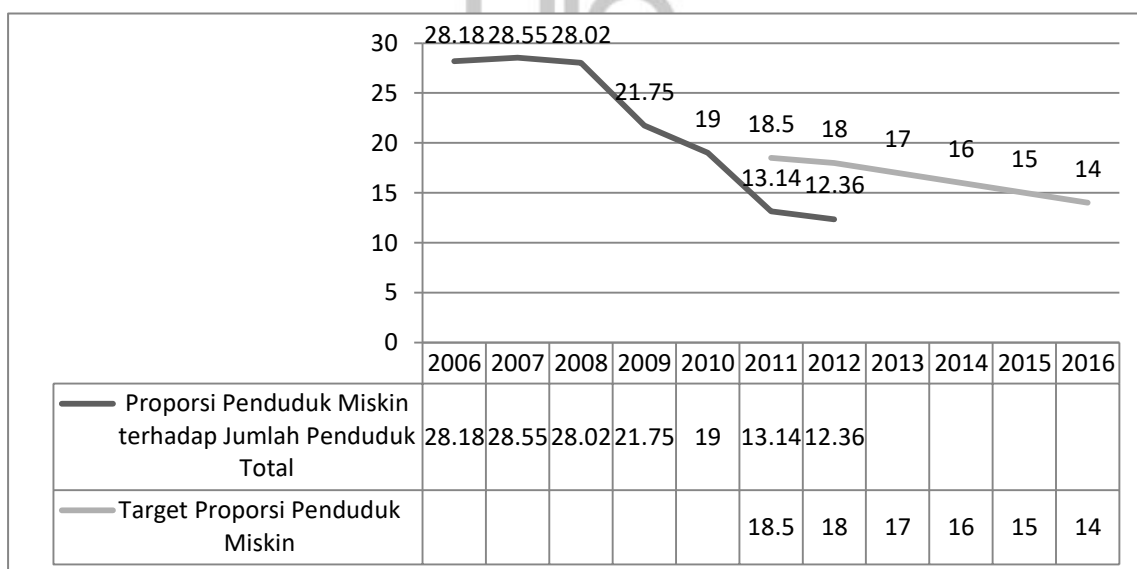
Perdesaan tapi juga untuk PNPM Pasca Krisis dan Panca Bencana juga digulirkan untuk lebih lengkapnya dapat dilihat table dibawah.

Tabel 3.
Alokasi Bantuan PNPM di Kabupaten Tasikmalaya¹¹

Tahun	Jumlah Kecamatan	Alokasi	
		APBN (Rp.)	APBD (Rp.)
2009	35	65.600.000.000	16.400.000.000
2010	35	57.200.000.000	11.550.000.000
2011	35	36.880.000.000	9.220.000.000
2012	35	31.920.000.000	1.680.000.000
2013	35	37.477.500.000	1.972.500.000
2014	35	32.384.835.000	2.319.000.000
Total		261.462.335.000	43.141.500.000

Jumlah bantuan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung untuk pengentasan kemiskinan diantaranya adalah: Pembangunan Inprastruktur Perdesaan, Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, Pendidikan dan Kesehatan.

Grafik 2
Proporsi (%) Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Jumlah Penduduk di Kabupaten Tasikmalaya



Sumber : Bappeda 2014

¹¹ Pokja RBM, Kado Rakyat Desa untuk Tasikmalaya (Tasikmalaya: RBM Tasikmalaya, 2012), 13.

Tahun 2006 sampai tahun 2008 terlihat angka kemiskinan masih tinggi dikisaran 28 %, setelah digulirkan PNPM trend angka kemiskinan cenderung menurun tahun 2009 angka kemiskinan berkisar 21,75%, menurun lagi di tahun 2010 dengan jumlah 19%. Tahun 2011 angka kemiskinan kembali turun di angka 13.14 sementara di target penurun di angka 18, 5% tentu saja melebihi target proporsi yang diharapkan begitu juga tahun 2012 dari target proporsi 18% angka kemiskinan melebihi ekspektasi di angka 12,36%.

Kecamatan Padakembang merupakan salahsatu kecamatan di kabupaten Tasikmalaya, letak kecamatan Padakembang berada di lingkungan kecamatan ibukota karena berbatasan langsung dengan kecamatan Singaparna yang merupakan ibukota pemerintahan.

Tabel 4
Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten
Tasikmalaya Tahun 2014

NO	KECAMATAN	INDEKS DAYA BELI	INDEKS KESEHATAN	INDEKS PENDIDIKAN	IPM
1	Kec. Singaparna	75.17	75.51	86.19	78.96
2	Kec. Mangunreja	76.16	74.58	84.69	78.47
3	Kec. Manonjaya	72.55	75.91	84.34	77.60
4	Kec. Ciawi	72.02	75.46	85.12	77.53
5	Kec. Sukarame	72.49	74.95	84.44	77.29
6	Kec. Rajapolah	73.28	74.87	82.88	77.01
7	Kec. Suka raja	73.11	75.05	82.66	76.94
8	Kec. Salawu	73.04	72.84	83.87	76.58
9	Kec. Cikatomas	70.84	74.33	84.12	76.43
10	Kec. Pagerageung	71.09	74.54	83.46	76.36
11	Kec. Sodonghilir	73.03	72.36	83.32	76.23
12	Kec. Cineam	71.13	74.62	82.71	76.15
13	Kec. Cisayong	70.96	72.95	82.59	75.50
14	Kec. Karangnunggal	66.84	74.91	84.34	75.36
15	Kec. Cikalong	68.16	74.57	83.25	75.33
16	Kec. Jatiwaras	70.92	72.57	82.27	75.25
17	Kec. Bantarkalong	69.82	72.66	83.23	75.23
18	Kec. Cigalontang	70.29	72.30	82.14	74.91
19	Kec. Cipatujah	62.95	73.58	82.37	72.97
20	Kec. Puspahiang	63.16	72.87	82.79	72.94
21	Kec. Salopa	65.59	71.28	81.89	72.92
22	Kec. Sariwangi	64.34	71.29	83.11	72.92
23	Kec. Cibalong	63.69	72.29	82.46	72.81
25	Kec. Pancatengah	64.84	70.78	82.21	72.61

NO	KECAMATAN	INDEKS DAYA BELI	INDEKS KESEHATAN	INDEKS PENDIDIKAN	IPM
27	Kec. Leuwisari	63.37	71.58	82.34	72.43
28	Kec. Padakembang	61.95	72.63	82.69	72.42
29	Kec. Taraju	61.78	72.25	83.19	72.41
30	Kec. Kadipaten	64.09	71.17	81.94	72.40
32	Kec. Tanjungjaya	63.88	71.15	81.82	72.28
33	Kec. Sukaresik	63.41	71.62	81.29	72.10
34	Kec. Sukaratu	61.76	72.28	81.96	72.00
35	Kec. Jamanis	62.28	71.16	81.51	71.65
36	Kec. Bojonggambir	60.57	70.79	82.50	71.29
37	Kec. Bojongasih	62.56	70.67	80.43	71.22
38	Kec. Culamega	62.04	69.87	80.31	70.74
39	Kec. Karangjaya	59.63	71.25	80.54	70.47
Kabupaten Tasikmalaya		65.27	72.56	82.60	73.48

Sumber : Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka

Letaknya yang strategis tidak membuat kecamatan ini lebih baik dapat dilihat dari posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kecamatan Padakembang berada di urutan ke 28 dari 39 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, angka IPM 72,42 bahkan di bawah standar kabupaten yang mencapai 73,48¹².

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah Penelitian

Salah satu program yang dijalankan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada peraturan presiden tentang percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.). Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan

¹² BPS Kabupaten Tasikmalaya, *Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka Tahun 2015* (Tasikmalaya: BPS Kabupaten Tasikmalaya, 2015), 37.

pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK)¹³.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan sebagai program percepatan penanggulangan kemiskinan kurang berhasil dalam memacu tumbuhnya partisipasi masyarakat miskin dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah, temuan ini diungkapkan oleh Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dihadapan para camat dan perwakilan kepala desa se- Kabupaten Tasikmalaya. Hal lainnya juga diungkapkan dalam pertemuan ini yaitu tidak nampak terjadinya penguatan kapasitas birokrasi lokal dalam proses perencanaan pembangunan yang seharusnya menguat dan menjadi argumentasi dilaksanakannya pemberdayaan masyarakat, hal ini terungkap pada hasil penelitian Bappeda Kabupaten Tasikmalaya mengenai dampak PNPM di 3 Desa yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya¹⁴.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LKPJ) dan Tasik Dalam Angka (TDA) yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bekerjasama dengan BPS, diketahui bahwa realisasi jumlah penduduk miskin serta proporsi jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk total dibandingkan dengan target RPJMD sudah tercapai. Namun secara relatif penurunan proporsi angka kemiskinan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebesar 1 (satu) persen setiap tahun yang ditetapkan pada RPJMD tidak tercapai, pada tahun 2012 hanya berhasil menurunkan angka penurunan kemiskinan sebesar 0.78 persen dari tahun 2011, berturut-turut tingkat penurunan angka kemiskinan adalah sebesar 0,76 persen untuk tahun 2013 terhadap tahun sebelumnya dan 0,03 persen tahun 2014 terhadap tahun sebelumnya. Asumsinya berarti bahwa tujuan akselerasi penanggulangan kemiskinan nampaknya tidak tercapai, bahwa ada harapan

¹³ Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Nasional Mandiri Perdesaan* (Jakarta: Departemen Dalam Negeri, 2014), 5.

¹⁴ Rubi Azhara, *Strategi Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya* (Bandung: Universitas Pasundan, 2016), Disertasi, 4.

terjadi akselerasi penurunan angka kemiskinan yang signifikan hasil dari kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan relatif tidak terjadi¹⁵.

Berdasarkan indikator masalah di atas, pernyataan masalah (*problem statement*) penelitian ini adalah kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan belum efektif memberikan kontribusi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya yang diduga disebabkan oleh implementasi kebijakan yang tidak efektif.

Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya”

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi yang dijalankan dalam PNPM dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana kemampuan dan penyediaan sumberdaya dalam PNPM dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya?
3. Bagaimana disposisi dalam PNPM dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya?
4. Bagaimana struktur birokrasi berperan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak di capai oleh peneliti dalam penelitian ini yakni:

¹⁵ Azhara, *Strategi Implementasi Kebijakan* , 3.

1. Untuk mengetahui komunikasi yang dijalankan dalam implementasi kebijakan PNPM dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui kemampuan dan penyediaan sumberdaya dalam implementasi kebijakan PNPM dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui disposisi dalam implementasi kebijakan PNPM dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui peranan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan PNPM dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis untuk memperkaya khazanah keilmuan dan untuk mengembangkan pengetahuan, terutama dalam bidang komunikasi, manajemen, psikologi dan administrasi dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan.
2. Secara praktis dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pemerintah dalam menerapkan program penanggulangan kemiskinan, terutama dalam menganalisa pemberdayaan masyarakat.
3. Secara akademis sebagai penambah pengetahuan bagi penulis dan pembacanya.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan diantaranya adalah, James Erik Siagian yang meneliti tentang analisis dampak pemberdayaan masyarakat melalui program pengembangan kecamatan terhadap pengentasan kemiskinan di kabupaten deli serdang. dalam penelitiannya yang menggunakan model logit, dengan menggunakan data primer hasil wawancara dengan 91 KK di Kecamatan STM Hulu dan 98 KK di

Kecamatan Pantai Labu. Hasil penelitian menunjukkan kemungkinan keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan adanya program penyediaan sarana sosial dasar sebesar 7 kali lebih besar dibandingkan tanpa adanya program penyediaan sarana sosial dasar. Demikian juga dengan variabel penyediaan sarana ekonomi mempunyai kemungkinan sebesar 14 kali berhasil mengentaskan kemiskinan, serta variabel lapangan kerja mempunyai kemungkinan sebesar 24 kali berhasil mengentaskan kemiskinan dibandingkan tanpa adanya program penyediaan lapangan kerja di Kecamatan Pantai Labu. Disimpulkan penyediaan sarana sosial dasar melalui program pengembangan kecamatan membelikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. Penyediaan sarana ekonomi melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu. Penyediaan lapangan kerja melalui program pengembangan kecamatan memberikan dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan di Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan Pantai Labu.¹⁶

Menurut Maulana dalam penelitiannya tentang Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang mengambil sampel di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2007. Populasi dalam penelitian ini adalah 163 dari masyarakat di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang mendapat bantuan dana Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yaitu masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Jumlah sampel dalam penelitian ini 113 keluarga miskin. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner dan metode dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji t-test. Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) berjalan baik. Program

¹⁶ James Erik Siagian, *Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang* (Medan: Sekolah Pasca Sarjana, 2007), Tesis, iv.

P2KP berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan dari penduduk desa Mertoyudan.¹⁷

Selanjutnya, Puji Meilita Sugiana yang melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menyarankan untuk melakukan penilaian terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Selain itu Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sarasannya secara lebih besar. Hambatan dari pelaksanaan program ini adalah pada implementasi program ini, banyaknya jenis usaha macet. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program ini.¹⁸

Dwi Prawani Sri Rejeki, meneliti tentang Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP di Kota Semarang, Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000-2003¹⁹. Penelitiannya lebih menyoroti tentang kinerja Fasilitator Kelurahan (Faskel) dari hasil kajiannya kinerja Faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan hasil nilai rata – rata dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Faskel dalam melaksanakan tugas kegiatan pendampingan program P2KP di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

¹⁷ Maulana, *Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2007* (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, 2008), Tesis, v.

¹⁸ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2012), Tesis, viii.

¹⁹ Dwi Prawani Sri Rejeki, *Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP di Kota Semarang (Studi Kasus di Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Tahun 2000 – 2003)* (Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006), Tesis, 106.

efektif, yang berarti kegiatan pendampingan yang telah dilakukan oleh Faskel dapat meningkatkan usaha peserta program P2KP.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tibyan, tentang Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen. Kesimpulan dari penelitiannya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan produktivitas Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen, disamping itu dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang terserap oleh Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen, yang terakhir Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dapat meningkatkan keuntungan Kelompok Swadana Mandiri (KSM) yang menerima pemberian bantuan kredit usaha ekonomi produktif di Kota Sragen²⁰

Nanik Indah Rupiani melakukan penelitian tentang Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Bidang Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2009. Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam jenis penelitian *explanatory* (penjelasan). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilengkapi dengan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan berdasarkan persepsi keluarga miskin anggota POKMAS penerima dana bergulir program PNPM. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang terkait dengan penelitian ini. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Modeling* atau SEM).

Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor bantuan modal dan faktor kinerja tenaga pendamping berpengaruh positif dan signifikan terhadap factor pemberdayaan keluarga miskin pada program PNPM di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember; faktor bantuan modal dan faktor kinerja tenaga pendamping

²⁰ Tibyan, *Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen* (Surakarta: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi, 2010), Tesis, 49.

berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember; serta faktor pemberdayaan keluarga miskin pada program PNPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.²¹

I Putu Mariana Adiputra, meneliti tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Hotel Suly Resort, Yoga & Spa Melalui Yayasan Bali Global Ubud - Bali. Hasil Penelitiannya, Pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan di Hotel Suly Resort, Yoga & Spa memiliki implikasi yang positif terhadap hotel dan masyarakat miskin. Implikasi bagi hotel meliputi image hotel, promosi hotel, kebersihan area umum hotel, efisiensi tenaga kerja dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Implikasi bagi masyarakat miskin meliputi peningkatan rasa percaya diri, peningkatan kemandirian, kedisiplinan, etika dan rasa tanggung jawab, kepedulian peserta untuk melestarikan seni budaya Bali, peningkatan taraf hidup keluarga dan peluang mendapatkan pendidikan lanjutan.²²

Penelitian lainnya dilakukan pula oleh Haris Wahyudi Ridwan, penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Demak, mengambil studi kasus tentang Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Demak yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, sebanyak 26 orang atau sebesar 32,1 % menyatakan sangat baik dan sebanyak 32 responden mengkatagorikan baik atau sebesar 39.5 % sedangkan katagori cukup baik sebesar 19,8 % atau sebanyak 16 responden namun ada 7 responden atau 8,6 % menyatakan tidak baik.

²¹ Nanik Indah Rupiani, *Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Bidang Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2009* (Jember: Program Pasca Sarjana Universitas Jember, 2010), Tesis, ix.

²² I Putu Mariana Adiputra, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Hotel Suly Resort, Yoga & Spa Melalui Yayasan Bali Global Ubud - Bali* (Denpasar: Program Pascasarjana Universitas Udayana, 2013), Tesis, 131.

Analisis uji hipotesis menunjukkan koefisien *rank kendall's* sebesar 0,813, bila dilihat dari harga hitung dan harga tabel sebesar $197,561 > 7,815$ sehingga H_0 ditolak artinya memiliki hubungan positif, dengan pengaruh 66,0%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerima program ini dengan baik, akan tetapi dalam pengawasan kegiatan program masih belum dilaksanakan dengan maksimal, masyarakat berharap agar program dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan kerjasama, koordinasi semua pihak akan menghasilkan program yang memuaskan.²³

Tabel 5
Rangkuman Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1	James Erik Siagian	Analisis Dampak Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengembangan Kecamatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang	Keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan adanya program
2	Maulana	Dampak Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mertoyudan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang Tahun 2007	Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) berjalan baik
3	Puji Meilita Sugiana	Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Jakarta Selatan	Program Belum efektif untuk meningkatkan kesejahteraan
4	Dwi Prawani Sri Rejeki	Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Implementasi Program P2KP di Kota Semarang	Faskel efektif dalam menjalankan tugasnya untuk penanggulangan kemiskinan
5	Tibyan	Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen	Program P2KP dapat meningkatkan keuntungan Kelompok

²³ Haris Wahyudi Ridwan, *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Demak, (Studi Kasus tentang Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)* (Semarang: Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2003), Tesis, iv.

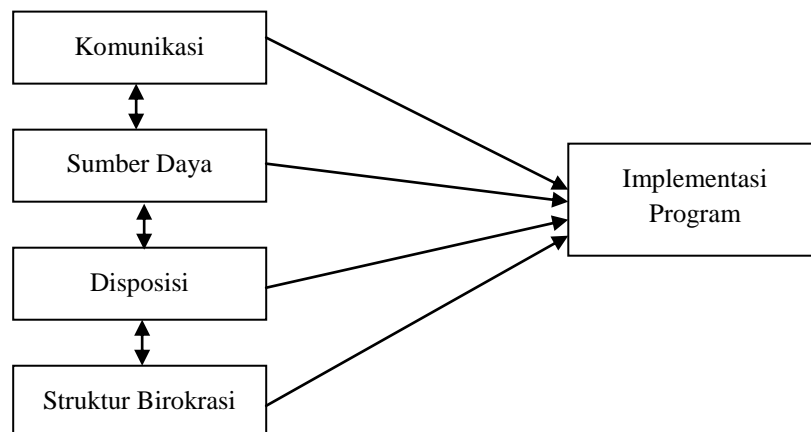
6	Nanik Indah Rupiani	Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Bidang Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2009	PNPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap faktor kesejahteraan masyarakat
7	I Putu Mariana Adiputra	Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Hotel Suly Resort, Yoga & Spa Melalui Yayasan Bali Global Ubud - Bali	Program memiliki implikasi yang positif terhadap hotel dan masyarakat miskin
8	Haris Wahyudi Ridwan	Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Demak,	Program mayoritas dinyatakan baik

E. Kerangka Pemikiran

Uraian di atas telah memberikan isyarat penting yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu melakukan penelaahan mendalam pada konsep kerja yang dijalankan secara normatif dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, aktualisasi pelaksanaan di lapangan dan perannya dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

Gambar 3

**Kerangka Pemikiran
Implementasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) dalam Penanggulangan Kemiskinan**



Dari gambar tadi dapat disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi yang berkaitan dengan sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi berimplikasi terhadap implementasi program
2. Sumberdaya yang berkaitan dengan komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi berimplikasi terhadap implementasi program
3. Disposisi yang berkaitan dengan komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi berimplikasi terhadap implementasi program
4. Struktur birokrasi yang berkaitan dengan komunikasi, sumberdaya dan disposisi berimplikasi terhadap implementasi program

